

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

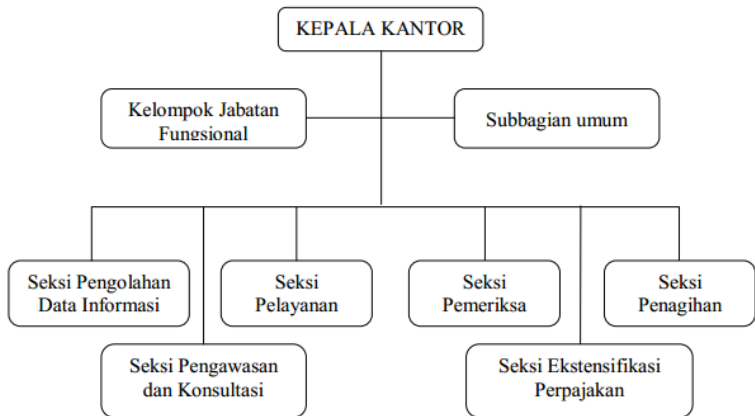
Pada akhir tahun 2007, dilakukan modernisasi dan penggabungan antara Kantor Pelayanan Pajak, Kantor Pemeriksa Pajak, Kantor Penyuluhan Pajak dan Kantor Pajak Bumi dan Bangunan di lingkungan Kanwil Pajak Jawa Barat 1, sehingga terbentuk 15 Kantor Pajak Pratama, yang diantaranya adalah KPP Pratama Bandung Cibeunying yang beralamat di Jl. Purnawarman No.21 Bandung.

Dalam struktur organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying berbentuk Struktur Organisasi Garis dan Staf, dimana KPP dipimpin oleh satu orang Kepala Kantor Pelayanan Pajak. Dalam menjalankan tugasnya, Kepala Kantor Pelayanan Pajak dibantu oleh bawahannya yang tergabung dalam beberapa seksi.

Adapun struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Bandung Cibeunying adalah sebagai berikut:

1. Kepala Kantor.
2. Sub Bagian Umum.
3. Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI).
4. Seksi Pelayanan.
5. Seksi Penagihan.
6. Seksi Pemeriksaan.
7. Seksi Ekstensifikasi Perpajakan.
8. Seksi Pengawasan dan Konsultasi I.
9. Seksi Pengawasan dan Konsultasi II.
10. Seksi Pengawasan dan Konsultasi III.
11. Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV.
12. Kelompok Jabatan Fungsional.

Gambar 1.1
Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung
Cibeunying



Sumber: Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying.

Dalam penelitian ini wajib pajak yang di maksud ialah para wajib pajak yang masuk dalam tanggung jawab pelayanan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying. Dimana proses kegiatan perpajakan dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying. Wajib Pajak Orang Pribadi yang berstatus sebagai Pegawai adalah orang pribadi sebagai subjek pajak dalam negeri yang melakukan pekerjaan.

Tabel berikut ini merupakan tabel jumlah wajib pajak aktif di KPP Pratama Cibeunying

Tabel 1.1
Jumlah Wajib Pajak Aktif di KPP Pratama Cibeunying

WAJIB PAJAK	TAHUN			
	2007	2008	2009	2010
1. Wajib Pajak Terdaftar.				
a. Wajib Pajak Badan.	11,935	13,479	14,743	15,999
b. Wajib Pajak Bendaharawan.	3,030	3,671	3,865	4,126
c. Wajib Pajak Orang Pribadi.	27,316	33,074	58,265	65,349
JUMLAH	42,281	50,224	76,873	85,474
2. Wajib Pajak Efektif.				
a. Wajib Pajak Badan.	10,886	12,229	13,327	14,548
b. Wajib Pajak Bendaharawan.	2,943	3,566	3,729	3,981
c. Wajib Pajak Orang Pribadi.	20,473	25,414	50,212	57,150
JUMLAH	34,302	41,209	67,268	75,679

Sumber: KPP Pratama Bandung Cibeunying (2012).

Tabel diatas menjelaskan tentang jumlah wajib pajak yang aktif melakukan pembayaran pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying mulai dari tahun 2007 sampai tahun 2010, dimana dari tahun ketahun jumlah wajib pajak yang aktif terus meningkat.

1.2 Latar Belakang Penelitian

Penerimaan pajak merupakan sumber utama pendapatan Negara dalam pembiayaan pemerintah dan pembangunan Pajak bertujuan meningkatkan

kesejahteraan rakyat melalui perbaikan dan peningkatan sarana publik. Alokasi pajak tidak hanya diberikan kepada rakyat yang membayar pajak tetapi juga untuk kepentingan rakyat yang tidak membayar pajak. Dengan demikian, peranan penerimaan pajak bagi suatu Negara menjadi sangat dominan dalam menunjang jalannya roda pemerintahan. Lembaga yang ditunjuk untuk mengelola pajak dalam hal ini adalah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dibawah naungan Departemen Keuangan Republik Indonesia. Target penerimaan pajak senantiasa mengalami peningkatan dari tahun ketahun. Adanya tuntutan akan peningkatan penerimaan pajak mendorong Ditjen Pajak terus melakukan reformasi perpajakan berupa penyempurnaan terhadap kebijakan perpajakan dan sistem administrasi perpajakan sehingga potensi penerimaan pajak yang tersedia dapat dipungut secara optimal dengan menjunjung asas keadilan sosial serta memberikan pelayanan prima kepada wajib pajak.

DJP melakukan modernisasi sistem administrasi perpajakan guna meningkatkan kualitas pelayanan perpajakan sehingga dapat meningkatkan penerimaan negara. Modernisasi perpajakan meliputi reformasi kebijakan, reformasi administrasi dan reformasi pengawasan. Reformasi kebijakan terdiri dari amandemen undang-undang antara lain UU No. 36 tahun 2008 mengenai Pajak Penghasilan, UU No. 16 tahun 2009 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), UU No. 42 tahun 2009 mengenai PPN dan PPnBM. Reformasi administrasi merupakan reformasi yang dilakukan berkaitan dengan organisasi, teknologi informasi dan SDM, sedangkan reformasi pengawasan terkait dengan adanya kode etik pegawai seiring dengan pelaksanaan *good governance* dan *equal treatment* dapat berjalan dengan baik. Dengan demikian tujuan modernisasi perpajakan adalah (1) tercapainya tingkat kepatuhan (*tax compliance*) yang tinggi, (2) tercapainya tingkat kepercayaan terhadap administrasi perpajakan yang tinggi dan (3)

tercapainya tingkat produktivitas pegawai pajak yang tinggi. Modernisasi administrasi perpajakan dilakukan oleh DJP sebagai bentuk peningkatan kualitas pelayanan perpajakan terhadap wajib pajak salah satunya dikembangkan pelaporan pajak terutang dengan menggunakan elektronik SPT (e-SPT). Pelaporan pajak terutang melalui SPT manual dinilai masih memiliki kelemahan khususnya bagi wajib pajak yang melakukan transaksi cukup besar harus melampirkan dokumen (*hardcopy*) dalam jumlah cukup besar kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP), sementara proses perekaman data memakan waktu cukup lama sehingga pelaporan SPT menjadi tertunda dan terlambat serta menyebabkan denda. Selain itu dapat terjadi kesalahan (*human error*) dalam proses ulang perekaman data secara manual oleh fiskus.

Dalam melakukan kewajiban perpajakan, yang salah satunya adalah melaporkan kewajiban perpajakan dengan menggunakan SPT, wajib pajak khususnya wajib pajak badan akan mengalami kesulitan dalam melaporkan PPN. PPN harus dilaporkan setiap bulannya dengan menggunakan SPT Masa PPN. Berbeda dengan melaporkan jenis pajak lainnya seperti Pajak Penghasilan (PPh) yang hanya wajib dilaporkan setiap tahun dengan data yang lebih sedikit dibandingkan PPN. Wajib pajak badan yang terdaftar sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), harus melaporkan sedemikian banyaknya faktur pajak masukan maupun keluaran berikut dengan SPT-nya setiap bulan. Sehingga pihak Direktorat Jenderal Pajak perlu lebih fokus terhadap efektifitas dan efisiensi penyampaian SPT Masa PPN. Jika ditinjau dari segi efektif sudah pasti e-SPT yang dikeluarkan oleh Dirjen Pajak efektif karena bertujuan untuk mempermudah penyampaian dan pelaporan, namun jika ditinjau dari keefisienan belum tentu apakah e-SPT yang dikeluarkan efisien atau tidak dimana para objek pengisi e-SPT ini berbeda-beda, sehingga juga terdapat banyak sekali pendapat yang berbeda-beda pula terhadap kemudahan dalam pengisian dan pelaporan SPT menggunakan e-SPT tersebut.

Dalam beberapa penelitian terdahulu Imelda (2004) menyimpulkan bahwa berdasarkan hasil pengujian hipotesis dengan menggunakan analisis regresi sederhana ini, berarti penerapan sistem SPT digital tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap efektifitas pemrosesan data perpajakan menurut persepsi WP badan.

Sukmarini (2007) juga meneliti mengenai perangkat keras, perangkat lunak, dan tenaga ahli. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat korelasi positif dan searah antara kedua variabel yang diteliti, yaitu sebesar 0,451 yang berarti bahwa terdapat hubungan yang sedang antara penerapan system SPT digital dengan efektifitas pemrosesan data perpajakan

Hasmoro (2009) juga melakukan penelitian mengenai efisiensi pengisian SPT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan e-SPT (masa PPN) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap efisiensi pengisian SPT (masa PPN) di KPP Madya Bandung.

Ita (2012) dan Lissa (2011) juga melakukan penelitian mengenai Pengaruh Penerapan e-SPT Terhadap Efisiensi Pengisian SPT menurut persepsi Wajib Pajak. Mereka juga menyimpulkan bahwa penerapan e-SPT (masa PPN) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap efisiensi pengisian SPT (masa PPN) di KPP Pratama Bojonagara dan di KPP Pratama Majalaya.

Alasan pemilihan objek penelitian di KPP Pratama Cibeunying karena telah ditetapkan langsung oleh Kanwil Direktorat Jendral Pajak Jawa Barat 1. Penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **Pengaruh Penerapan e-SPT PPN Terhadap Efisiensi Pengisian SPT Menurut Persepsi Wajib Pajak: Survey terhadap Pengusaha Kena Pajak pada KPP Pratama Cibeunying.**

1.3 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan di atas maka masalah yang dapat diidentifikasi adalah:

1. Bagaimana penerapan e-SPT PPN pada KPP Pratama Cibeunying menurut persepsi wajib pajak?
2. Bagaimana efisiensi pengisian SPT menggunakan aplikasi e-SPT PPN menurut persepsi wajib pajak?
3. Apakah terdapat pengaruh penerapan e-SPT PPN terhadap efisiensi pengisian SPT menurut persepsi wajib pajak?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui penerapan e-SPT PPN pada KPP Pratama Cibeunying menurut persepsi wajib pajak.
2. Untuk mengetahui efisiensi pengisian SPT menggunakan aplikasi e-SPT PPN menurut persepsi wajib pajak.
3. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh dari penerapan e-SPT PPN terhadap efisiensi pengisian SPT menurut persepsi wajib pajak.

1.5 Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Kegunaan Akademis

Hasil penelitian yang diperoleh dapat digunakan sebagai referensi bagi perpajakan, menambah wawasan, pengetahuan, dan meningkatkan pemahaman mengenai menambah wawasan, pengetahuan, dan meningkatkan pemahaman efektivitas penerapan e-SPT PPN sebagai salah satu bentuk penerapan sistem administrasi perpajakan modern di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak khususnya pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Cibeunying melalui uji lapangan dan kuesioner.

2. Bagi Praktis

Sebagai informasi yang perlu diperhatikan bagi pihak Direktorat Jenderal Pajak dalam memahami aspek-aspek yang berpengaruh terhadap penerimaan pajak sebagai salah satu tujuan dari reformasi administrasi perpajakan melalui penerapan e-SPT dan sejauh mana efesiensi dari penerapan e-SPT dan kendala-kendala yang menghambat dalam penerapannya dan sebagai informasi yang bermanfaat bagi masyarakat khususnya dalam mendorong kepercayaan masyarakat terhadap sistem administrasi perpajakan modern di Indonesia.

1.6 Sistematika Penulisan

Pembahasan dalam skripsi ini akan dibagi dalam lima bab yang terdiri dari beberapa sub-bab. Sistematika penulisan skripsi ini secara garis besar adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memberikan penjelasan mengenai gambaran umum objek penelitian, latar belakang penelitian yang mengangkat fenomena yang menjadi isu penting sehingga layak untuk diteliti, perumusan masalah yang didasarkan pada latar belakang penelitian, tujuan penelitian dan kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan secara umum.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN LINGKUP PENELITIAN

Bab ini memberikan penjelasan mengenai tinjauan pustaka sebagai dasar berpijak dalam menganalisis permasalahan yang ada. Pada bagian ini terdapat landasan teori yang berhubungan dengan, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan pengembangan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini memberikan penjelasan mengenai jenis penelitian, pendekatan penelitian yang digunakan, identifikasi variabel dependen dan

variabel independen, definisi operasional variabel, tahapan penelitian, jenis dan sumber data (populasi dan sampel), uji validitas dan reabilitas, serta teknik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini memberikan penjelasan mengenai uraian keadaan responden yang diteliti, deskripsi hasil penelitian yang telah diidentifikasi, analisis model dan hipotesis, dan pembahasan mengenai pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini memberikan penjelasan mengenai kesimpulan hasil penafsiran dan pemaknaan terhadap hasil analisis temuan penelitian dan saran secara kongkrit yang diberikan terhadap hasil penelitian.